



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KECAMATAN ASTAMBUL

TAHUN 2024

Kode Organisasi : 1.20.14.00

Nama SKPD : KECAMATAN ASTAMBUL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Astambul Tahun 2023 sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Kecamatan Astambul Tahun 2024 ini adalah merupakan dokumen pertanggung jawaban dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah unsurdari fungsi pelayanan umum dengan tugas pokok pada pemerintahan umum,serta sebagai unsur Pemerintahan Kabupaten Banjar bersama SDKP Teknis untuk mewujudkan pencapaian target-target RPJMD 2021-2026, telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Kecamatan Astambul sebagai bahan evaluasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja ini semoga dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja dari instansi yang berkepentingan.

Astambul, 28 Februari 2025
Camat Astambul



AHMAD FAUZI, S.Sos, MM
NIP. 196801231998031007

	Hal
KATA PENGANTAR.....	1.
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2.
DAFTAR ISI.....	2.
BAB I PENDAHULUAN.....	5Error! Bookmark not defined.
A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN	
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI.....	Error! Bookmark not defined.
C. ISU STRATEGIS	
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	Error! Bookmark not defined.
B. PERJANJIAN KINERJA	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	Error! Bookmark not defined.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	Error! Bookmark not defined.
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN,.....	30
C. REALISASI ANGGARAN.....	37
D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2019	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP.....	44
A. KESIMPULAN.....	44
Lampiran.....	45

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Perangkat Daerah Kabupaten Banjar tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam Renstra Perubahan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar 2021 - 2026 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan pada tahun 2024 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap sasaran strategis Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar tahun 2024 menunjukkan bahwa capaian pada sasaran strategis masuk pada kategori Sangat Baik (A) dengan capaian kinerja 80,38 %.

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar yang baik, tepat sasaran dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka dibutuhkan sumber daya manusia baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, sumber daya manusia perencana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap

pembangunan daerah Kabupaten Banjar. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Banjar.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Kecamatan Astambul berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar dan rincian anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Astambul adalah seperti dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase (%)
APBD	Rp2.604.856.444,00	89,87%

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
BELANJA DAERAH	2.604.856.444,00	2.341.064.000,00	89,87	2.346.651.309,00
BELANJA OPERASI	2.604.856.444,00	2.341.064.000,00	89,87	2.233.223.570,00
Belanja Pegawai	1.922.236.012,00	1.721.447.516,00	89,55	1.667.877.816,00
Belanja Barang dan Jasa	682.620.432,00	619.616.484,00	90,77	565.345.754,00
BELANJA MODAL	-	-	100,00	113.427.739,00
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan	(2.604.856.444,00)	(2.341.064.000,00)	100,00	(2.346.651.309,00)

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Kecamatan Astambul
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Kecamatan Astambul
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Kecamatan Astambul kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Kecamatan Astambul
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Kecamatan Astambul

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri/ Permen KL terkait dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Astambul.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

(Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 3);

8. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Banjar Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

B.1 KEDUDUKAN:

Kecamatan Astambul merupakan unsur Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 TUGAS:

Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2003 Tanggal 04 Juni 2014 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

B.3 FUNGSI :

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas. Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;

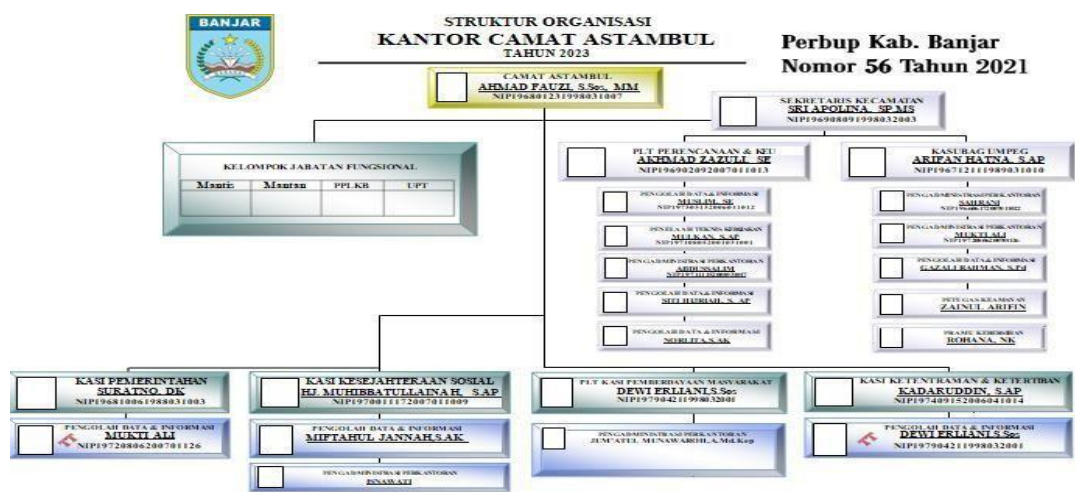
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan.

Susunan Organisasi Kecamatan Astambul terdiri dari:

Susunan organisasi Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar terdiri dari:

- 1. Camat.
- 2. Sekretaris Kecamatan, yang terdiridari :
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3. Kepala Seksi Pemerintahan
- 4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 7. Kelompok Fungsional.

Secaralengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:



Gambar 1.1. Bagan SOTK Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar

C. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKANTUGASDAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Astambul yang membantu Kepala Daerah dalam Urusan Pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra Perubahan dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar

masalah, dan hirarki permasalahan tersusun secara "cascading" (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Kecamatan Astambul masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Tabel I
Tabel Permasalahan pada Kecamatan Astambul

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Pengoptimalan pengelolaan data pemerintahan desa/ kelurahan di kecamatan
			Meningkatkan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan di kecamatan
		Pengoptimalan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Pengoptimalan pengelolaan data pemerintahan umum kecamatan.
			Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan
		Pengoptimalan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Pengoptimalan pengelolaan atas trantibumlinmas di kecamatan
			Meningkatkan pelaksanaan koordinasi trantibumlinmas di kecamatan
		Pengoptimalan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kebencanaan kecamatan	Pengoptimalan pengelolaan data penyelenggaraan pelimpahan kewenangan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kebencanaan kecamatan peraturan perundangan.
			Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan kebencanaan kecamatan

Sumber : Dokumen Perubahan Renstra Kec. Astambul Thn.2021-2026

D. ISU STRATEGIS

Kecamatan Astambul secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis. Kecamatan Astambul sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok Pelayanan, memiliki peran yang sangat

penting didalam merumuskan kebijakan Pemerintahan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam Pemerintahan.

Sebelum menentukan isu dilakukan identifikasi permasalahan. Hasil identifikasi tersebut kemudian dilakukan analisa pohon masalah yang selanjutnya diltampilkan dalam bentuk matriks pemetaan masalah utama, masalah dan akar masalah sebagaimana tersebut di atas (Bab I.C). Isu srategis adalah permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*Unresolved Matters*) yaitu permasalahan yang belum terselesaikan yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan penyelenggaraan dimasa akan datang.

Identifikasi isu-isu yang diperoleh dari proses sebelumnya tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada **Permendagri 86 Tahun 2017**, kesepakatan melalui FGD atau penilaian ahli atau kombinasi sehingga akan di peroleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Kecamatan Astambul adalah Pelaksanaan Pelayanan Paten masih belum maksimal.

Sistematika Penyajian

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Astambul Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

KATA PENGANTAR;

DAFTAR ISI;

RINGKASAN EKSEKUTIF;

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi;

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN/PENETAPAN KINERJA

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2024 dan Realisasi Anggaran Tahun 2024 beserta analisisnya

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan Saran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Kecamatan Astambul mengampu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Berdasar urusan dan program yang diampu, Kecamatan Astambul mendukung pencapaian misi keempat Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah”

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Astambul Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

			program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar No. 5 Tahun 2022tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)	Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik / Sangat Tinggi)	

Sumber : Surat Keputusan IKU Kecamatan Astambul Tahun 2024

B. PERJANJIANKINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2024 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2024 meliputi sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Formulasi Perhitungan	Target	Satuan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	76	Nilai		2.604.856.444	Camat
2.	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Kecamatan	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	74	Indeks	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.343.875.444	Sekretaris Camat

2.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang telah disusun : Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi yang harus	100	Persen	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.311.000	Kasubbag Prenkeua
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan : jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan x 100%	100	Persen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.922.236.012	Kasubbag Prenkeua
2.3	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Jumlah Administrasi Kepegawaian di Kecamatan yang terlaksana : jumlah Administrasi Kepegawaian di Kecamatan yang direncanakan x 100%	100	Persen	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.300.000	Kasubbag Umpeg
5	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan yang dilaksanakan : Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan yang direncanakan x 100%	100	Persen	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.348.000	Kasubbag Umpeg

6	Terselenggaranya Kegiatan Kantor	Persentase Terasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia : Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang direncanakan x 100%	100	Persen	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.220.432	Kasubbag Umpeg
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah yang terpelihara : jumlah pemeliharaan BMD penunjang urusan perangkat daerah yang direncanakan x 100%	100	Persen	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.460.000	Kasubbag Prenkeua
8	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan : Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan x 100%	100	Persen	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	101.469.000	Kasi Kesos
9	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan : Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang direncanakan x 100%	100	Persen	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	42.203.000	Kasi Pemberdayaan Masyarakat

10	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang dilaksanakan : Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang direncanakan x 100%	100	Persen	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	41.172.000	Kasi Tantibum
11	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	jumlah penyelenggaraan Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah yang terlaksana : jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%	100	Persen	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.868.000	Kasi Trantibum
12	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan : Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100%	100	Persen	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	63.377.000	Kasi Pemerintahan

13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terfasilitasi : jumlah fasilitasi yang direncanakan x 100%	100	Persen	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.892.000	Kasi Pemerintahan
----	--	--	---	-----	--------	--	------------	-------------------

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Thn 2024 Kecamatan Astambul

• CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100\%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100\%$$

Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Kecamatan Astambul Kab. Banjar tahun 2024 yang telah disepakati.

Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 2.3 Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≥ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≥ 90 %	Tinggi
3	66 % ≥ 75 %	Sedang
4	51 % ≥ 65 %	Rendah
5	≥ 50 %	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut :

Tabel 2.4
Realisasi Kinerja Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Target	Satuan	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan	Nilai Evaluasi Kecamatan	76	Nilai	97,92	128,84	Sangat Tinggi
2.	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Kecamatan	74	Indeks	69,73	94,23	Sangat Tinggi

2.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100	Persen	72,85	72,85	Sedang
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100	Persen	88,18	88,18	Tinggi
2.3	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	100,00	100	Sangat Tinggi
3	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	100	Persen	109,90	110	Sangat Tinggi
4	Terselenggaranya Kegiatan Kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	100	Persen	93,43	93,43	Sangat Tinggi
5	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100	Persen	112,67	112,67	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana	100	Persen	99,72	99,72	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	94,45	94,45	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	100,00	100,00	Sangat Tinggi

9	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	Persen	100,00	100,00	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	66,56	66,56	Sedang
11	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	99,00	99,00	Sangat Tinggi

Penjelasan Tabel 2.4 sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang merupakan Sasaran Kecamatan Astambul Tahun 2024 dengan Indikator Kinerja Nilai Evaluasi dengan target 76 dapat terealisasi 97,92 dengan nilai capaian 128,84%,dengan predikat capaian **Sangat Tinggi**.
2. Sasaran kinerja Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian dengan Indikator Kinerja Indeks Kepatuhan Kinerja Intern (IKKI) target 74 realisasi 69,73 dengan nilai capaian 94,23%,dengan predikat capaian **Sangat Tinggi**.
 - 2.1 Sasaran Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas dengan Indikator Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu Target 100 % dengan Realisasi 72,85 dengan predikat capaian **Sedang**
 - 2.2 Sasaran Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Yang Berkualitas dengan Indikator Persentase Dokumen Keuangan

Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu Target 100 % dengan Realisasi 85,18 dengan predikat capaian **Tinggi**

2.3 Sasaran Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah dengan Indikator Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi Target 100 % dengan Realisasi 100 dengan predikat capaian **Sangat Tinggi**

3. Sasaran Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor dengan Indikator Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi dengan capaian kinerja sebesar 109,90%, dengan predikat capaian **Sangat Tinggi**
4. Sasaran Terselenggaranya Kegiatan Kantor dengan indikator Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran memperoleh capaian kinerja sebesar 93,43 %, dengan predikat capaian **Sangat Tinggi**
5. Sasaran kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan dengan indikator Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah memperoleh capaian kinerja sebesar 112,67 %, dengan predikat capaian **Sangat Tinggi**.
6. Sasarankinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan dengan indikator Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang terlaksana memperoleh capaian kinerja sebesar 99,72 %, dengan predikat capaian **Sangat Tinggi**.
7. Sasaran kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator Persentase Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlaksana memperoleh capaian kinerja sebesar 94,45 %, dengan predikat capaian **Sangat Tinggi**
8. Sasaran kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan memperoleh capaian kinerja sebesar 100%, dengan predikat capaian **Sangat Tinggi**.
9. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi memperoleh Capaian kinerja 100 % dengan predikat capaian **Sangat Tinggi**

10. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan dengan indicator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi memperoleh capaian kinerja 66,56 % dengan predikat capaian **Sedang**.
11. Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan dengan indicator Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa memperoleh capaian kinerja 90,00 % dengan predikat capaian **Sangat Tinggi**.

A.2 REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan bagian dari kinerja strategis Kecamatan Astambul sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 . Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir

NO.	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Tahun 2024		Tahun 2023		Tahun 2022		Keterangan
				Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	97,92	128,84	83,62	119,46	NA	NA	Tinggi
2.	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Kecamatan	Indeks	69,92	94,49	55,46	75,97	NA	NA	Sedang
2.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Persen	72,85	72,85	100,00	100	NA	NA	Sedang
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Persen	88,18	88,18	90,68	100	NA	NA	Tinggi

2.3	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Persen	100,00	100,00	95,43	100	NA	NA	Sangat Tinggi
5	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	Persen	109,90	109,90	80,10	100	NA	NA	Sangat Tinggi
6	Terselenggaranya Kegiatan Kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	Persen	93,43	93,43	64,46	100	NA	NA	Sangat Tinggi
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	Persen	112,67	112,67	87,51	100	NA	NA	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan, Pelimpahan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana	Persen	99,72	99,72	91,19	100	NA	NA	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persen	94,45	94,45	88,91	100	NA	NA	Sangat Tinggi

10	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100,00	100,00	99,96	100	NA	NA	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Persen	100,00	100,00	100	100	NA	NA	Sangat Tinggi
12	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persen	66,56	66,56	99,96	100	NA	NA	Sedang
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	99,00	99,00	100	100	NA	NA	Sangat Tinggi

Sumber : Renstra Perubahan Kec. Astambul 2021-2026

Berdasarkan data pada tabel 2.5 di atas tentang Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2021-2026, tahun 2023 dan 2024 Kecamatan Astambul menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan. Capaian indikator kinerja sasaran strategis Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan terealisasi pada tahun 2024 sebesar 97,92 dengan target sebesar 76. Nilai tersebut sudah melebihi target tahun 2024 yang sudah ditentukan dibandingkan dengan tahun 2023 capaian indikator kinerja sasaran strategis Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan terealisasi sebesar 83,62.
2. Capaian kinerja Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian dengan indikator kinerja Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 69,73 dengan target 74. Nilai tersebut kurang dari target tahun 2024 yang sudah ditentukan, dibandingkan dengan tahun 2023 dengan realisasi sebesar 55,46.
3. Realisasi capaian kinerja pada Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu memperoleh capaian kinerja 72,85% tidak sama halnya dengan tahun 2023 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
4. Realisasi capaian kinerja Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang berkualitas dengan indikator kinerja Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu tahun 2024 memperoleh capaian kinerja sebesar 88,18% tidak sama dibandingkan dengan tahun 2023 dengan capaian kinerja lebih tinggi sebesar 100%.
5. Realisasi capaian kinerja Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah dengan indikator Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi tahun 2024 memperoleh capaian kinerja sebesar 100 % tidak sama

dibandingkan dengan tahun 2023 dengan capaian kinerja lebih tinggi sebesar 95,43 %

6. Realisasi capaian kinerja Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi tahun 2024 memperoleh capaian kinerja 109,90% melebihi capaiannya dengan tahun 2023 yang memiliki capaian kinerja sebesar 80,10%.
7. Realisasi capaian kinerja Terselenggaranya Kegiatan Kantor dengan indikator kinerja Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran tahun 2024 memperoleh capaian kinerja 93,43% melebihi capaian kinerjanya tahun 2023 yaitu sebesar 64,46%.
8. Realisasi capaian kinerja Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan dengan indikator kinerja Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan tahun 2024 memperoleh capaian kinerja 112,67% melebihi pada tahun 2023 memiliki capaian kinerja yaitu sebesar 87,51%.
9. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan tahun 2024 memperoleh capaian kinerja 99,72% dibandingkan dengan tahun 2023 dengan capaian kinerja lebih rendah sebesar 91,19%.
10. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan tahun 2024 memperoleh capaian kinerja 99,45% lebih rendah pada tahun 2023 dengan capaian kinerja yaitu sebesar 88,91%.
11. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan tahun 2024 memperoleh capaian kinerja 100% dan pada tahun 2023 memiliki capaian kinerja yang rendah yaitu sebesar 99,96%.
12. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya koordinasi dan Fasilitasi

- Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang terfasilitasi tahun 2024 memperoleh capaian kinerja 100% sama halnya dengan tahun 2023 juga memiliki capaian kinerja yang sama yaitu sebesar 100%.
13. Realisasi capaian kinerja Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan dengan indikator kinerja Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tahun 2024 memperoleh capaian kinerja 99% lebih besar tahun 2023 yang memiliki capaian kinerja yaitu sebesar 100%.

A.3 REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Indikator kinerja sasaran Tahun 2024 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2021-2026. Pencapaian kinerja tahun 2023 Perubahan Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2023, untuk mengetahui kemampuan Kecamatan Astambul selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2023 dan Target Periode Akhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO.	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Reallisasi Tahun 2024	Target Periode Akhir Renstra (2026)	Persentase Capaian Akhir Renstra (2026)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	97,92	86	100
2.	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Kecamatan	Indeks	69,73	81	100
2.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Persen	72,85	100	100
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Persen	88,18	100	100

2.3	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Persen	100,00	100	100
5	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	Persen	109,90	100	100
6	Terselenggaranya Kegiatan Kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	Persen	93,43	100	100
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	Persen	112,67	100	100
8	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana	Persen	99,72	100	100
9	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persen	94,45	100	100

10	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100,00	100	100
11	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Persen	100,00	100	100
12	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persen	66,56	100	100
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	99,00	100	100

A.4 REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2024 DAN TARGET NASIONAL

Merupakan capaian kinerja yang membandingkan dengan kinerja yang ditargetkan nasional, untuk mengukur keberhasilan daerah dengan standar Nasional. Tentang Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tidak bisa disandingkan dengan Target Provinsi Dan Nasional seperti tabel di atas mengingat belum diperolehnya data yang akurat dan kredible mengenai target Provinsi maupun Nasional tersebut, dapat dilihat dari Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi dan Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Reallisasi Tahun 2024	Reallisasi Provinsi	Reallisasi Nasional
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	97,92	NA	NA
2.	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Kecamatan	Indeks	69,73	NA	NA
2.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Persen	72,85	NA	NA
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	Persen	88,18	NA	NA

2.3	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	Persen	100,00	NA	NA
5	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	Persen	109,90	NA	NA
6	Terselenggaranya Kegiatan Kantor	Persentase Terasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	Persen	93,43	NA	NA
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	Persen	112,67	NA	NA
8	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana	Persen	99,72	NA	NA
9	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persen	94,45	NA	NA

10	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persen	100,00	NA	NA
11	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	Persen	100,00	NA	NA
12	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persen	66,56	NA	NA
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	99,00	NA	NA

Berkenaan dengan tabel **2.7 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Provinsi dan Nasional** Merupakan capaian kinerja yang membandingkan dengan kinerja yang ditargetkan nasional, untuk mengukur keberhasilan daerah dengan standar Nasional. Tentang Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2024 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tidak bisa di sandingkan dengan Target Provinsi dan Nasional seperti tabel di atas mengingat belum diperolehnya data yang akurat mengenai target Provinsi maupun Nasional.

A.5 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU
PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI
YANG TELAH DILAKUKAN

Pada Tahun 2024 berdasarkan Renstra Perubahan Kedua Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Sasaran Strategis Kecamatan Astambul yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerja sasaran yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan beberapa sasaran kinerja lainnya guna mendukung sasaran strategis Kecamatan

5.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

Dalam Upaya pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Astambul Tahun 2024 yang telah berhasil memperoleh nilai 97,92 dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi:

Faktor Keberhasilan Sasaran

1. Peran penting dari Masyarakat/ desa yang berperan dalam memberikan informasi dan data dukung di saat Kecamatan Astambul melakukan pengumpulan data yang diminta oleh tim penilai kabupaten. Hal ini menjadikan pelaksanaan penilaian Sasaran Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.
2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja baik program, kegiatan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencapaian

kinerja secara keseluruhan yang harus dilakukan agar bisa mengetahui perkembangan pelaksanaan kinerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan solusi.

Faktor Penghambat Sasaran

Faktor penghambat tercapainya sasaran adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia
2. Kualitas data dukung penilaian yang tidak sesuai kriteria tim penilai.
3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi, karena masih terdapat pegawai yang belum bisa menguasai komputer.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pencapaian kinerja

Upaya Perbaikan

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kinerja ASN.
2. Monitoring dan evaluasi bulanan jugadiperlukan dalam rangka pencapaian tujuan kinerja.

5.2 Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program, Perencanaan Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Dalam upaya pencapaian sasaran kinerja terselenggaranya urusan penyusunan program, perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian dengan indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) dengan perolehan capaian 69,73 dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi :

Faktor Keberhasilan Sasaran

1. Koordinasi yang baik dalam Tim sehingga meningkatnya Nilai IKKI
2. Kelengkapan administrasi baik di perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian;
3. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian; serta
4. Komitmen Pimpinan dalam Pencapaian Nilai IKKI.

Faktor Penghambat Sasaran

1. Terlambatnya melaksanakan/mengatur jadwal pemenuhan data IKKI
2. Adanya beberapa dokumen yang tidak terpenuhi dikarenakan belum dilakukan oleh SKPD.

Upaya Perbaikan

- 1. Penyusunan jadwal rapat koordinasi pemenuhan data IKKI agar dilaksanakan pada bulan Juli.
- 2. Melaksanakan kegiatan/membuat dokumen yang belum terpenuhi di tahun sebelumnya.

A.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk kegiatan yang pencapaian kinerjanya mencapai 100 %. Dari 6 (enam) kegiatan3 (tiga) kegiatan mayoritas menunjukkan pencapaian yang sama dengan 100% tetapi dengan realisasi anggaran kurang dari 100% , Untuk kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mencapai kinerja sebanyak 55.46 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 83.32% dari total anggaran yang dialokasikan. Kegiatan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 99,92% dari total anggaran yang dialokasikan. kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 99,90% dari total anggaran yang dialokasikan. kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 99,80% dari total anggaran yang dialokasikan. kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kecamatan, mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran sebanyak 100% dari total anggaran yang dialokasikan.

Banyaknya kegiatan yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik, dan lebih jauh juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 2.8 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja (≥ 100 %)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan	Nilai Evaluasi Kecamatan	97,92	79,73	18,19
2.	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Kecamatan	69,73	80,18	-10,45
2.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	72,85	76,57	-3,72
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	88,18	100	-11,82
2.3	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	100	0,00

5	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	91,55	122	-30,70
6	Terselenggaranya Kegiatan Kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	92,61	79,79	12,82
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	92,68	126	-33,33
8	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana	99,72	99,72	0,00
9	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	94,45	94,45	0,00
10	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	99,64	100	-0,36

11	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100,00	100	0,00
12	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	66,56	70,06	-3,49
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	99,00	98,57	0,43

A.7 ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJUKAN KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Dalam menunjang sasaran kinerja Program/Kegiatan ada beberapa faktor keberhasilan dan kegagalan diantaranya yaitu :

7.1 Faktor Keberhasilan

- Ketersediaan Sumber Daya berupa anggaran yang cukup dalam melaksanakan program/kegiatan dan kualitas SDM yang cukup;
- Adanya peran dari Pimpinan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan;
- * Bertambahnya sarana pendukung kinerja berupa PC/Laptop dalam menjalankan kegiatan.

7.2 Faktor Kegagalan

- Perubahan jadwal kegiatan atau mendadaknya jadwal kegiatan yang disampaikan SKPD/Unit lain ke Kecamatan;
- Faktor cuaca yang tidak menentu

A.8 REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

8.1. EVALUASI KINERJA TAHUN 2024

Berdasarkan Surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar Nomor: 700.1.2/101/LHE/P.Kin.As/II/ITDA Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Tahun 2024 Tanggal 28 Juni 2024 merekomendasikan sebagai berikut :

1. Melakukan pengendalian internal terhadap ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan kinerja yang memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*) sehingga dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Dokumen-dokumen perencanaan kinerja tersebut sebagai berikut :
 - a. Perubahan Rencana Strategis 2021-2026 (Renstra Perubahan 2021-2026);
 - b. Rencana Kerja Tahunan (Renja) Tahun 2024
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 yang telah diformalkan;
 - d. Tabel Keselarasan Tahun 2024;
 - e. Penilaian Kinerja (PK) Tahun 2024 yang telah diformalkan;
 - f. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Triwulan I Tahun 2024

- g. Pemantauan atas Capaian Kinerja oleh atasan langsung (ada bukti dukung telah dilakukannya upaya Pemantauan Capaian Kinerja Periodik (Notulen Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi/Foto Kegiatan) di Triwulan I Tahun 2024 (Laporan Monitoring Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2024).
2. Melakukan pengendalian internal terhadap ketersediaan dokumen-dokumen pengukuran kinerja yang menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan serta dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Dokumen-dokumen pengukuran kinerja tersebut sebagai berikut :
- a) Pedoman Pengukuran Kinerja (SK Tim AKIP Tahun 2024) dan Pedoman Pemberian *Reward* dan *Punishment*;
 - b) Laporan Kinerja Triwulan I;
 - c) Keterlibatan Pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam mengukur Capaian Kinerja (ada bukti dukung telah dilakukannya upaya pemantauan capaian kinerja periodik (notulen rapat, daftar hadir, dokumentasi/foto kegiatan) di Triwulan I Tahun 2024;
3. Melakukan pengendalian internal terhadap ketersediaan dokumen-dokumen pelaporan kinerja yang telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja dan upaya perbaikan/penyempurnaannya serta telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Dokumen-dokumen pengukuran Kinerja tersebut sebagai berikut :
- a) Dokumen LKjIP Tahun 2023;
 - b) Laporan Kinerja Triwulanan (LKJ Simondalev Kinerja yang memuat faktor penghambat dan faktor pendorong), Triwulan I 2023 sampai dengan Triwulan IV 2023 dan LKJ Triwulan I Tahun 2024)
 - c) Keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja (ada bukti dukung telah dilakukannya upaya pemantauan dan evaluasi kinerja tahunan (notulen rapat, daftar hadir, dokumentasi/foto kegiatan).
4. Melakukan pengendalian internal terhadap ketersediaan dokumen-dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai, sehingga implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja. Dokumen-dokumen pengukuran kinerja tersebut sebagai berikut :
- a. Tindak Lanjut LHE Sakip Tahun 2023 beserta bukti dukung telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi;

- b. Menggunakan teknologi informasi (aplikasi e-Sakip Kabupaten Banjar) dalam hal pengukuran kinerja berjenjang sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.
5. Mempublikasikan. dokumen-dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal melalui website esr.menpan.go.id dan website perangkat daerah

D.2. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Kecamatan Astambul telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Menggunakan dokumen Renstra sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan;
2. Mengukur kinerja staf dan melakukan monitoring kinerja secara periodik.
3. Menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja;
4. Menyajikan analisa untuk capaian kinerja pada pemantauan rencana aksi dan Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi.
5. Melaksanakan monitoring target jangka menengah dalam Renstra dengan tahun berjalan, sehingga target-target kinerja jangka menengah dalam Renstra belum selaras dengan target-target kinerja tahunan dalam Rencana Kinerja Tahunan serta menindaklanjuti terhadap rekomendasi yang diberikan atas monitoring pencapaian target kinerja tersebut
6. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi capaian kinerja secara memadai dan dilakukan secara berkala (periodik), didasarkan suatu mekanisme yang terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan data, mencatat, dan siapa yg mensupervisi, serta sumber data valid dan dapat diverifikasi), serta tepat waktu;
7. Melaksanakan monitoring pencapaian rencana aksi secara berkala dan memanfaatkannya dalam setiap pengarahan dan pengorganisasian kegiatan;

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan anggaran yang dikelola Kecamatan Astambul tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.604.856.444,- dengan realisasi Anggaran Rp. 2.341.064.000,-(89,87%) dengan rincian untuk belanja pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 1.922.236.012,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.721.447.516 (89,55%),untuk belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp.682.620.432,- dengan realisasi sebesar Rp 619.616.484,-(90,77%), Dalam tabel dapat dilihat :

B.1 Realisasi Jenis Anggaran

Tabel 3.8 * Realisasi Jenis Belanja

No.	Belanja	Anggaran	Realiasi	Capaian (%)
1.	Belanja Operasi	2.604.856.444	2.341.064.000	89,87
	a. Belanja Pegawai	1.922.236.012	1.721.447.516	89,55
	b. Belanja Barang dan Jasa	682.620.432	619.616.484	90,77
	c. Belanja Hibah	-	-	-
2.	Belanja Modal	-	-	-

Tabel B.2 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi	Capaian (%)
		2.604.856.444	2.078.781.941	79,80
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.343.875.444	1.839.564.441	78,48
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.311.000	2.535.200	76,57
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.001.000	635.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.310.000	1.900.200	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.922.236.012	1.475.754.417	76,77
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.888.996.012	1.442.514.417	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33.240.000	33.240.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.300.000	22.300.000	100,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.300.000	2.300.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	20.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.348.000	106.780.644	89,47
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	597.000	589.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.797.000	1.766.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.240.000	13.220.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.714.000	3.404.800	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.000.000	87.800.344	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.220.432	162.913.680	79,38
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.270.432	12.470.010	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.950.000	149.443.670	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.460.000	69.280.500	96,95
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.780.000	55.784.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.680.000	8.638.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	4.858.000	
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	101.469.000	101.186.500	99,72
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	101.469.000	101.186.500	99,72
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	101.469.000	101.186.500	
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	42.203.000	40.135.000	95,10
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	42.203.000	40.135.000	95,10
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.028.000	15.506.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.175.000	24.629.000	
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	43.040.000	42.760.000	99,35
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	41.172.000	40.892.000	99,32
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	39.304.000	39.024.000	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.868.000	1.868.000	

	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.868.000	1.868.000	100,00
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.868.000	1.868.000	
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	63.377.000	44.400.000	70,06
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	63.377.000	44.400.000	70,06
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	35.000.000	35.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	28.377.000	9.400.000	
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.892.000	10.736.000	98,57
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.892.000	10.736.000	98,57
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.750.000	1.750.000	
	Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.000.000	3.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.750.000	1.750.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.286.000	1.286.000	
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.106.000	2.950.000	

Tabel B.3 Realisasi Anggaran Untuk Mewujudkan Sasaran Kinerja Organisasi Sesuai Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00
	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan	Nilai Evaluasi Kecamatan	76	97,92	128,84	2.604.856.444	2.078.781.941	79,80
1	Terselenggaranya Urusan Penyusunan Program Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern Kecamatan	74	69,73	94,23	2.343.875.444	1.839.564.441	78,48
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100	72,85	72,85	3.311.000	2.535.200	76,57
3	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Mutu	100	88,18	88,18	1.922.236.012	1.475.754.417	76,77
4	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dan Tepat Waktu	100	100,00	100,00	22.300.000	22.300.000	100,00

5	Terselenggaranya Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor yang Terpenuhi	100	109,90	109,90	119.348.000	106.780.644	89,47
6	Terselenggaranya Kegiatan Kantor	Persentase Terfasilitasinya Penyelenggaraan Penunjang Administrasi Perkantoran	100	93,43	93,43	205.220.432	162.913.680	79,38
7	Tersedianya Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Kebutuhan	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	100	112,67	112,67	71.460.000	69.280.500	96,95
8	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang Terlaksana	100	99,72	99,72	101.469.000	101.186.500	99,72
9	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	94,45	94,45	42.203.000	40.135.000	95,10
10	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100	100,00	100,00	41.172.000	40.892.000	99,32

11	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	100,00	100,00	1.868.000	1.868.000	100,00
12	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	66,56	66,56	63.377.000	44.400.000	70,06
13	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	99,00	99,00	10.892.000	10.736.000	98,57

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari indikator kinerja yang diperjanjikan Nilai Evaluasi Kecamatan Astambul masuk dalam kategori **Berhasil** dengan target 76 dan realisasi 97,92 sehingga memperoleh nilai capaian kinerja sebesar 128,84% dengan pagu anggaran Program sebesar Rp. 2.604.586.444,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.341.064.000,- atau sebesar 89,87%

hal ini disebabkan antara lain :

1. Perlunya peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan agar dapat mengembangkan kemampuan, inovasi, kreatifitas dan motipasi dalam program penyelenggaraan pembangunan.

B. SARAN-SARAN

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Pelatihan aparatur kecamatan dalam rangka menambah wawasan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pembahasan di tingkat yang lebih tinggi tentang program dan kegiatan yang selama ini dilaksanakan di kecamatan agar sinkron antara perencanaan dan keuangan agar adanya kejelasan dalam capaian kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja
3. Perlunya peningkatan wawasan dan pendampingan yang rutin terhadap aparatur kecamatan khususnya dalam penyusunan laporan SAKIP.

Laporan Kinerja Kecamatan Astambul tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.